

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GOWA
(Perspektif *Maq sid al-Syar ah*)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

FITRIANI. B

NIM: 10400113035

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani, B
NIM : 10400113035
Tempat/Tgl.Lahir : Buttadidi, 09 Agustus 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Poros Malino Buttadidi
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Di Kabupaten Gowa (Perspektif *Maqâsid al-Syariah*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 1 Agustus 2017

Penyusun,

ALA UDDIN
MAKASSAR
Fitriani, B
NIM: 10400113035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lala Lintas di Kabupaten Gowa (Perspektif Maqdisid al-Syariah)"*, yang disusun oleh FITRIANI. B , NIM: 10400113035, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 3 Agustus 2017 M, bertepatan 10 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 7 Agustus 2017 M
14 Dzulhijjah 1438 H

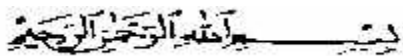
DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Zulhas'hari Mustafa, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.HI	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP. 19461016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa (Perspektif *Maq sid al-Syar ah*).” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta **Baharuddin** dan Ibunda tercinta **Jumaliah** yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak **Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag**, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, **Bapak Dr. Hamsir**,

SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, **Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak **Dr. Abdillah Mustari, M.Ag** dan Bapak **Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag**, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun.
4. Bapak **Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag** dan **Dr. H. Abdul Wahid Haddade, L.c., M.HI** Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penyusun.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terkhusus Ibu Maryam yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
6. Sahabat seperjuangan Israyanti, Mustainah, Sunarti, Irtah Pahlawanti dan Iin Wahyuni yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian serta kasih sayangnya dan terima kasih atas kesabaran yang tak henti-hentinya menyemangati dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum terkhusus Angkatan 2013 “ARBITER” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamîn.*

Samata, 1 Agustus 2017

Penyusun,



Fitriani B

Nim: 10400113035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRASNSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9-29
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	9
1.Defenisi Pelanggaran	11
2.Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	13
B. Ketentuan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	15
C. Peran Penegak Hukum dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
D. Upaya Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas	21
E. Lalu Lintas dan <i>Maq sid al-Syar ah</i>	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30-36
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Pendekatan penelitian.....	31
D. Sumber data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV ASPEK SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS	37-58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1.Letak Geografis	37
2.Kepolisian Resort Gowa	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa dan Sistem Penegakan Hukumnya	38
C. Pandangan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hal Menjaga Jiwa dan Hilangnya Harta ditinjau dari <i>Maq sid al-Syar ah</i>	49
BAB V PENUTUP.....	59-60
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	a		es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	a		ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es

	Syin	Sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik dibawah)
	ad		de (dengan titik dibawah)
	a		te (dengan titik dibawah)
	a		zet (dengan titik dibawah)
	'ain		apostrof terbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah		Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fat ah	A	A
	Kasrah	I	I
	ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fat ah dan y	Ai	a dan i
	fat ah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
-------------------------	------	--------------------	------

... /	Fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
	Kasrah dan y		i dan garis di atas
	ammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

: *m ta*

: *ram*

قيل : *q la*

يموت : *yam tu*

4. *T marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a f l*

المدينة الفاضلة : *al-mad nah al-f ilah*

: *rau ah al-a f l*

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: *rabbān*

نجينا : *najjān*

: *al- aqq*

: *nu”ima*

: *‘duwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

: *‘Arab* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

: *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

: *al-zalzalah* (az-zalzalah)

: *al-falsafah*

: *al- bil du*

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: *ta'mur na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fil al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-jal lah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله *d null h bill h*

Adapun *t' marb* ah di akhir kata yang disandarkan kepada laf *al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة اللهم *hum f ra matill h*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan:

Za d, Na r mid Ab).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *sub nah wa ta' l*

QS.../...: 4 : *QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4*

HR : *Hadis Riwayat*

ABSTRAK

Nama : Fitriani. B

Nim : 10400113035

**Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KABUPATEN GOWA (Perspektif *Maq sid al-Syar ah*)**

Penulisan karya tulis ini bertujuan yaitu untuk: 1) Mengetahui apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas; 2) Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa dan sistem penegakan hukumnya; 3) dan Mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal menjaga jiwa dan hilangnya harta ditinjau dari *Maq sid al-Syar ah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* kualitatif. Penelitian dilakukan di Polres Gowa Sektor Somba Opu Kabupaten Gowa. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Data dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder yaitu informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dapat juga dilakukan dengan Browsing internet, dan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah atau karya tulis lainnya.

Setelah melakukan penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Faktor terjadinya pelanggaran dapat disebabkan oleh 1) Faktor manusia; 2) Faktor Kendaraan; 3) Faktor Jalan. Penulis juga menerima data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan jumlah pelanggaran tahun 2014 sebanyak 4.448 perkara, tahun 2015 sebanyak 6.483 perkara, dan tahun 2016 sebanyak 7.663 perkara. Sebagian masyarakat sadar akan pelanggaran yang dilakukan itu salah dan dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta serta melenceng dari tujuan hukum Islam atau *Maq sid al-Syar ah*, tapi terkadang kesadaran itu tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Maka perlu adanya penegakan hukum agar masyarakat mengerti aturan perundang-undang tentang berlalu lintas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, polisi juga harus lebih tegas dalam menjalankan penegakan hukum, agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta apabila terjadi kecelakaan.

Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana.² Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.³

Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai seperti tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak menggunakan helm, dan melawan arus.

Secara sosiologis harus diakui bahwa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang selama ini telah berjalan dan disepakati secara bersama-sama. Semakin maju cara berfikir manusia itu dalam menerima atau menolak suatu keyakinan yang selama ini di anutnya. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dan perkembangan dalam masyarakat harus dijadikan pertimbangan hukum agar hukum itu punya arti dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat serta mampu merealisasikan *Maq sid al-Syar ah*.

²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), h. 4.

³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 152.

Istilah tujuan atau maksud disyariatkannya sebuah hukum dalam tradisi keilmuan hukum Islam dikenal dengan konsep *Maq sid al-Syar ah*. Dalam pandangan ulama *Maq sid al-Syar ah* adalah mengenai masalah hikmah dan Ilat ditetapkan suatu hukum.

Salah satu contohnya adalah menaati rambu-rambu lalu lintas, pada saat lampu merah menyala maka hukum menyatakan bahwa semua kendaraan harus berhenti dan ini adalah illat atau sebab ditetapkan hukum. Hikmahnya adalah agar mencegah terjadinya kecelakaan.

Oleh karena itu dalam rangka menjamin kepastian hukum, hukum Islam berpatokan pada hal-hal yang sifatnya pasti, nyata dan dapat dibuktikan, bukan sebaliknya yakni berdasarkan pada hal-hal yang sifatnya praduga dan kira-kira. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin/pemerintah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas dalam Islam terdapat perintah agar mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Menaati Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin. Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya,

⁴Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2009), h.87.

dan pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman yang bisa membuat orang itu jera untuk tidak mengulangi pelanggarannya.

Jika di lihat dari sudut pandang sosiologi masyarakat sendiri atau diri perseorangan itu tergantung seseorang dalam memahami atau mematuhi dan mentaati hukum yang sudah ada karena untuk mentaati peraturan tersebut melihat pada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial.

Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan masyarakat dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas agar orang lain merasa aman dan nyaman dalam berkendara dengan membudayakan kajian-kajian agama ke segala tingkat masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas (Perspektif *Maq sid al-Syar ah*). Mengacu pada permasalahan pokok di atas maka pembahasan di bagi dalam ke beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa dan sistem penegakan hukumnya ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal menjaga jiwa dan hilangnya harta ditinjau dari *Maq sid al-Syar ah*?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada pelanggaran lalu lintas mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditinjau dari sosiologi hukum dan *Maq sid al-Syar ah*.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian dari uraian di atas, dapat dideskripsikan substansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini, bahwa ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas jika ditinjau dari aspek sosiologi hukum sangat berkaitan, dimana sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (masyarakat).⁵

Maq sid al-Syar ah yang memiliki arti untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan Hadis) yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa dalam perspektif *Maq sid al-*

⁵Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 11.

Syar ah. Agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian, maka penelitian ini dilengkapi beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Iskandar Abubakar dalam bukunya *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, mengatakan bahwa Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁶
2. Fathi al-Daraini dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Maqashid al-Syariah* merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fikih.⁷
3. Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak melakukan fungsi regeling atau pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman dan fungsi

⁶Iskandar Abubakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1966), h. 75.

⁷Fathi al-Daraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib* (Damsyik: T.p., 1979), h. 63.

berstruktur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁸

Bahwa penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya. Penulis akan membahas mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar agar tercipta kemaslahatan dalam bermasyarakat dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang biasa kita lihat, salah satu pelanggaran itu ialah tidak lengkapnya surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui apa yang dimaksud dengan lalu lintas.
- b. Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di kabupaten gowa dan sistem penegakan hukumnya.
- c. Mengetahui Pandangan masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal menjaga jiwa dan hilangnya harta ditinjau dari *Maq sid al-Syar ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua kegunaan yaitu dari segi teoritis dan praktis.

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa.

⁸Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984), h. 58.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam perspektif *Maq sid al-Syar ah*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai “perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”.¹ Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.² Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360).³

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan

¹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta., 1987), h. 556.

²Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas* (Kompetensi Utama, Semarang., 2009), h. 6.

³Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara: Jakarta., 1992), h. 208

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.⁴ Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikualifikasikan sebagai pelanggar.

Suatu perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka kehendak tertuju pada :

1. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran lalu lintas serta angkutan
2. Prasarana jalan raya terlindungi
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya).

⁴Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang* (Malang Fakultas Hukum: Skripsi tidak diterbitkan., 2002), h. 9.

Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi budaya bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud-maksud di atas nyatalah bahwa adanya sopan santun berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan. Sopan santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

1. Defenisi Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. “Melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih ringan dari pada kejahatan.

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁵

Sedangkan menurut Bawengan mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik hukum.⁶

Di dalam Hukum pidana terbagi atas dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati aturan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Tipe-tipe pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:⁷

- a. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum;
- b. Tentang pelanggaran ketertiban umum;
- c. Tentang pelanggaran penguasa umum;
- d. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan;
- e. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
- f. Tentang pelanggaran kesusilaan;
- g. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan;

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 71.

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 20-21.

⁷Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 208.

- h. Tentang pelanggaran jabatan;
- i. Tentang pelanggaran pelayaran.

Menurut Nur Fitriani, secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut:

- 1). Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2). Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3). Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.⁸

Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas dimana pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengguna kendaraan. Terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

⁸Nur Fitriani, *Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas* (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2011), h. 14.

- b. Dalam berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai safety belt.
- c. Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- d. Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
- e. Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan.
- f. Seringkali pengendara sepeda motor bersikap seenaknya dijalanan dengan melawan arus. Pengendara seolah menganggap hal ini tidak jadi masalah, namun pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud ialah saling tabrak menabrak bagi para pengendara.⁹

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, tentunya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

⁹[http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas-di-jalan-
raya.html?m=1](http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas-di-jalan-
raya.html?m=1). (diakses pada tanggal 19 Januari 2017).

B. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:¹⁰

Pasal 275

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu).

Pasal 285

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alu ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

C. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Di Indonesia ini dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri.¹¹

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Ed. I; Cet. XXIII; Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 24.

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan;
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industri;
4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi dan;
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya dibidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan dibidang lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti yang dijelaskan di atas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.

Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat.¹² Dari pernyataan prinsip di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sengan diharapkan oeh masyarakat).

¹²Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2000), h. 19.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹³ Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

D. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas¹⁴

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa di mukanya terdapat tikungan yang berbahaya, akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu

¹³Efendi Bahtiar, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), h. 1.

¹⁴Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id (diakses pada tanggal 9 Juni 2017)

lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.

Untuk itu upaya penanggulangan pihak Satlantas Polres Gowa melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Gowa menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Gowa yaitu upaya preventif dan upaya represif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas Polres Gowa guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.

- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS, Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, Saka Bhayangkara dan lain-lain.
- d. Polmas atau pemolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta system pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
- g. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya

dikemudian hari masyarakat akan berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

2. Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlantas Polres Gowa dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).

c. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polres Gowa kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Polres Gowa. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran.

E. *Lalu Lintas dan Konsep Maq sid al-Syar ah*

Lalu lintas adalah gerak pindah kendaraan dan manusia di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pengertian lalu lintas dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang di maksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntuhkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa lalu lintas dapat diartikan sebagai hilir mudiknya manusia dan atau barang dari satu tempat ketempat lainnya. Suatu perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat.

Adapun *Maq sid al-Syar ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *Maq sid* dan *Syar ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqsad*, *Qashd*, *Maqsid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 butir 2.

makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁶ Sedangkan *Syar ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹⁷ Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat peraturan dari urusan agama itu.¹⁸

Arti bahasa *Syar ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *Syar ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *Syar ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Karena, tidak bisa dibayangkan jika Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana membuat syariat yang bisa memudharatkan, menyusahkan, atau membebani manusia dalam urusan agama. Kecuali jika membuat syariat, Dia tidak mengetahui tentang kesempitan, kesulitan, dan kemudharatan tersebut. Atau mengetahui, tetapi Dia

¹⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maq sid al-Syar ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 178-179.

¹⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maq sid al-Syar ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h.61.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran), h. 500.

sengaja ingin membebani dan menyusahkan manusia. Namun, kedua hal tersebut mustahil bagi Allah.

Adapun tentang ketidaktahuan Allah, hal itu sama sekali dijauhkan dari Allah. Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 5.

إِنَّ اللَّهَ لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.¹⁹

Dia menciptakan manusia, mengetahui kemaslahatan dan kerusakan bagi manusia, serta hal yang bisa membuat manusia maju dan mundur. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Mulk/67: 14.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan. Dan Dia Maha halus serta Maha Mengetahui.²⁰

Adapun tentang Dia ingin menyempitkan, menyulitkan, dan membebani manusia, hal ini pun telah dinafikan oleh Allah dengan sangat pasti dalam Al-quran. Dimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²¹

Menurut Imam al-Syatibi, *Maq sid al-Syar ah* adalah tujuan –tujuan disyari’atkannya hukum oleh Allah Swt. Yang berintikan kemaslahatan umat

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 60.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 563.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 28.

manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maq sid* (tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.²²

Kemaslahatan yang dimaksud dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu 1) *Maq sid al-Syari'* (tujuan Allah), dan *Maq sid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maq sid al-Syar ah* dalam arti *Maq sid al-Syari'*, mengandung empat aspek yaitu:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

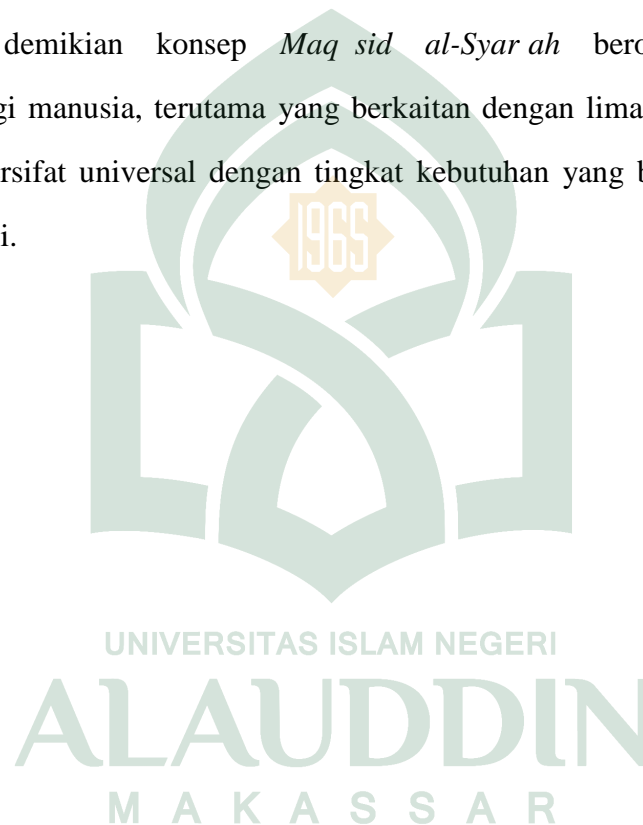
Aspek pertama berkaitan dengan muatan atau hakikat *Maq sid al-Syar ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Untuk mewujudkan kemaslahatan menurut al-Syatibi membagi *Maq sid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maq sid Dharuriyat*, *Maq sid Hajiyyat*, dan *Maq sid Tahsiniyat*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hajiyyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyat* artinya sesuatu yang

²²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maq sid al-Syar ah Menurut al-Syatibi*, h. 5.

diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindari keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* dijelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : 1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); 2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); 3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); 4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); 5) menjaga harta (*hifzh al-mal*).²³

Dengan demikian konsep *Maq sid al-Syar ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi.



²³Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai jenis penelitian sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau disebut juga dengan penelitian normatif yuridis, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian *field research* kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah)¹. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.²

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperoleh selama kegiatan penelitian. Untuk menentukan lokasi penelitian maka ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Penelitian dilakukan di Resor Gowa Sektor Somba Opu Kabupaten Gowa.

¹Lexii J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995), h. 15.

²Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa (Perspektif *Maq sid al-Syar ah*), peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pada dasarnya metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Creswell menyebutkan bahwa penelitian yang di bimbing dengan metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang diselenggarakan untuk memahami permasalahan manusia atau permasalahan sosial, dengan cara menciptakan gambaran yang menyeluruh serta kompleks melalui laporan berupa kata-kata, pandangan yang detail dari sumber informasi dan latar belakang yang alamiah³.

Berdasarkan paparan tentang penelitian kualitatif diatas, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis ialah cara pandang atau paradigma mempelajari tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

2. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁴

³Lexii J.Maleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 3.

⁴<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (9 Juni 2016).

D. Sumber Data

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dapat juga dilakukan dengan Browsing internet.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah atau karya tulis lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian normatif dan penelitian yuridis:

1. Observasi

Pada penelitian ini, salah satu tehnik pengumpulan data yang peneliti terapkan adalah tehnik observasi. Jika didefinisikan, observasi dapat dipahami sebagai suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Pada dasarnya penggunaan tehnik observasi ini digunakan pada penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan ketika responden yang diamati pada lingkup yang tidak terlalu luas.⁵ Maka, untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan/observasi pada aparat dari Polres Gowa guna untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara. Secara konsep, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi yang dimaksud adalah dalam bentuk dialog, yang bersifat tanya jawab. Pada interaksi dan komunikasi ini, terlibat dua faktor yaitu pewawancara dan narasumber atau responden. Pewawancara merupakan pihak yang bertanya sedangkan narasumber atau responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak yang bertanya atau pewawancara. Pada konteks ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan mewawancarai beberapa pihak yakni pihak dari Polres Gowa dan pengguna kendaraan bermotor. Pada teknisnya, peneliti menggunakan tehnik wawancara langsung atau wawancara secara *face to face* (Polres Gowa dan pengguna jalan) serta jenis wawancara semistructur interview yang menanyakan opini, pandangan serta tanggapan pihak-pihak tersebut terhadap tinjauan sosiologi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

3. Dokumentasi

Pada dasarnya dua teknik pengumpulan data sebelumnya dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari objek yang diteliti (data primer). Pada penelitian ini peneliti juga memperoleh data yang tidak langsung berasal dari objek penelitian yang diteliti. Dengan kata lain bahwa peneliti juga menghimpun data dari dokumen-doumen yang bersangkutan serta data dari akses situs internet maupun beberapa literatur.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, maka dari itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: daftar pertanyaan penelitian, camera, alat perekam, pulpen dan buku tulis.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan, mengusahakan supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses, cara, perbuatan mengolah.

Data berarti keterangan yang benar dan nyata dan atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Jadi, pengolahan data ialah proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana.

2. Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dapat dipahami. Susan Stainback juga memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan analisis

data. Ia mengemukakan bahwa analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif, yang mana hal itu digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dari data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dikembangkan dan dievaluasi.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu tahapan pada penelitian yang didalamnya terdapat sebuah proses, yang mana proses itu berupa pengorganisasian data, penjabaran data, penafsiran data serta penyimpulan data yang telah ditafsirkan sebelumnya.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data model Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷

a) *Data reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap awal ini, peneliti berupaya untuk merangkum data-data yang telah peneliti dapatkan ketika melakukan observasi, wawancara serta data dari sumber dokumen lain. Atau dengan kata lain pada tahap ini peneliti memilih data-data yang pokok atau relevan dengan kebutuhan penelitian.

b) *Data display* (Penyajian Data)

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data pokok yang telah dirangkum sebelumnya ke dalam bentuk bagan dan penjelasan data dalam bentuk teks. Peneliti memberikan pemaparan tentang data-data yang ditemui dan telah difilter pada tahap sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa penafsiran atau penerjemahan data, agar kemudian dapat dipahami.

⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), h. 244.

⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 246.

c) *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap akhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan penafsiran data pada tahap sebelumnya.



BAB IV

ASPEK SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16` Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6` Bujur Timur dari kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya antara 12°33.19` hingga 13°15.17` Bujur Timur dan 5°5` hingga 5°34.7` Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Ibukota Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa yang berada pada wilayah Kecamatan Somba Opu dan terletak pada jarak 6 Km sebelah Selatan Kota Makassar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.¹

2. Kepolisian Resort Gowa

Kepolisian Resort Gowa atau Polres Gowa merupakan pelaksanaan tugas Polri di wilayah Kabupaten Gowa. Polres Gowa merupakan satuan kewilayahan Polri yang

¹<http://gowakab.go.id/profile>. (diakses pada tanggal 2 Juni 2017).

bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa yang memiliki total luas 1.883,32 km². Polres Gowa sendiri beralamatkan di jalan Samsuddin Tunru No. 58 Sungguminasa Gowa

Dalam kesehariannya Polres Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Gowa membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Gowa antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa dan Sistem Penegakan Hukumnya

Hampir setiap hari di Kabupaten Gowa terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun di luar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas.

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

1. Faktor Manusia

Menurut Suwardjoko pencatatan dan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya.² Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs, penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.³

Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya di antaranya:⁴

²Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002), h. 108.

³Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 344.

⁴Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2009), h. 2.

a. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

b. Pengetahuan

Dalam menciptakan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesengajaan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum tersebut.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan meruakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas jalan raya, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan bisa didapat dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung (fisik).

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) kendaraan baik kendaran bermotor maupun kendaraan tidak bermotor akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

3. Faktor Jalan

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggung jawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut, dimana setiap instansi berkewajiban memberikan masukan dengan dilengkapi dengan data dan fakta serta analisis sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan bahan pertimbangan merumuskan solusi secara bersama.

Diantara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum

⁵<http://yenisaputri080893.blogspot.co.id/2013/08/makalah-penegakan-hukum.html?m=1>
(diakses tanggal 9 juni 2017).

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya untuk menggunakan daya paksa.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa untuk memfungsikan hukum secara nyata, maka harus dilakukan penegakan hukum, oleh karena dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁶

Menurut Wahyuddin Husein Hufron bahwa sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkesejahteraan, berkepastian, dan berkeadilan. Dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum yaitu 1) *Total enforcement concept*; 2) *Fullen force ment concept*; 3) *Actualen forcement concept*.⁷

Demi supremasi hukum, maka penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Bukan justru dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan hak asasi manusia.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Gowa sebagai tempat penelitian Penulis, yang diwakili oleh Bripka Nursyamsu Alam M.H selaku

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 160.

⁷Wahyudin Husein Hufron, *Hukum, Politik dan Kepentingan* (Cet. I; Surabaya: Pusderankum Press, 2008), h. 211.

bagian Satlantas Polres Gowa, maka Penulis dapat memperoleh informasi bahwa pada dasarnya penegakan hukum yang diberikan aparat penegak hukum dalam hal pelanggaran lalu lintas yaitu dengan memberikan efek pencegahan terlebih dahulu supaya pelanggaran itu tidak terulang, harapannya dengan denda yang diberikan kepada pelanggar membuat mereka sadar agar tidak mengulangi lagi pelanggaran yang sama.

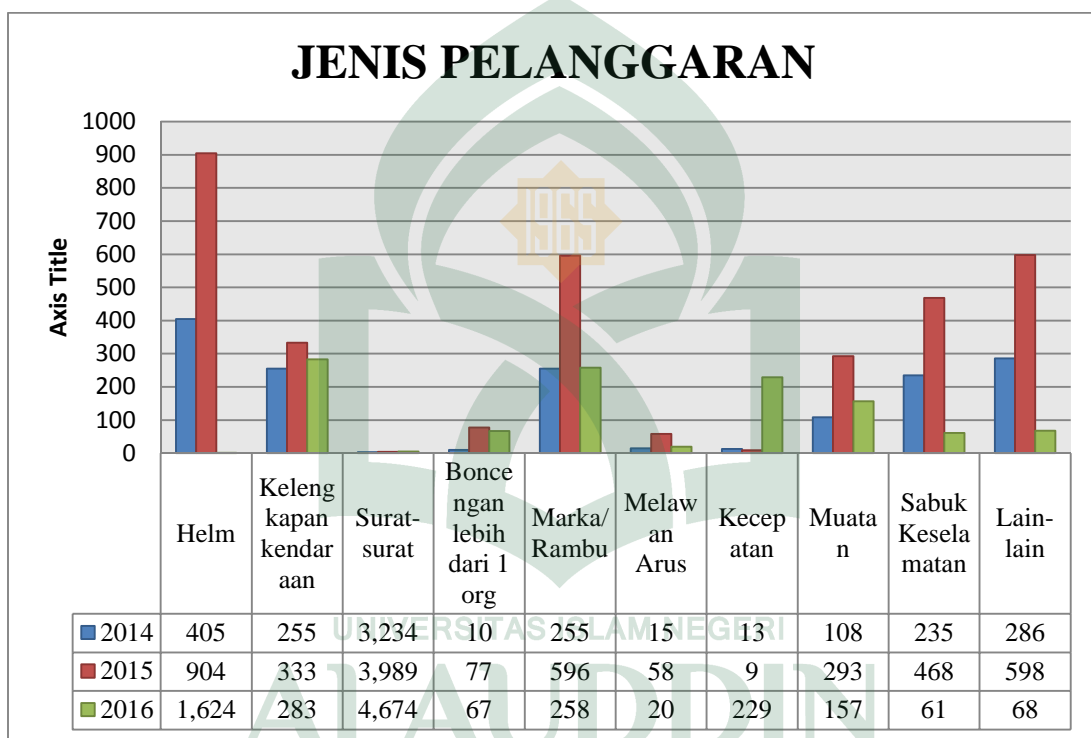
Secara universal kegiatan penegakan hukum dapat berupa tindakan pencegahan preventif dan represif. Tindakan preventif ialah segala usaha atau tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum misalnya jika ada petugas berdiri di pinggir jalan, petugas sementara pengaturan, petugas sementara pengawalan, petugas sementara patroli semua itu tindakan preventif dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Harapannya dengan adanya petugas disana mereka tidak akan melanggar, kadang ada pendapat bahwa kehadiran petugas disitu adalah simbol hukum itu sendiri ketika polisinya tidak ada disana maka dengan sendirinya aturan itu tidak ada. Jadi cenderung masyarakat lebih takut pada polisinya di banding aturan itu sendiri. Sedangkan tindakan represif yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat kepolisian tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa tindakan administrasi, tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, oleh pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.⁸

⁸Nursyamsu Alam, Satlantas Polres Gowa, Wawancara, 24 Maret 2017.

Selain itu, Penulis juga memperoleh data mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gowa mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, penulis tuangkan dalam grafik berikut ini:

Grafik 1:

Jenis Pelanggaran



Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gowa cenderung mengalami peningkatan, baik pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Jenis pelanggaran surat-surat kendaraan yang pada tahun 2014 jumlah pelanggaran sebanyak 3.234 perkara dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 3.989 perkara, dan ditahun 2016 sebanyak 4.674 perkara. Pelanggaran helm standar pada

tahun 2014 terdapat 405 perkara, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 904 perkara, dan pada tahun 2016 sebanyak 1.624 perkara. Sedangkan pelanggaran kecepatan mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu pada tahun 2014 ada 13 perkara, tahun 2015 ada 9 perkara, dan pada tahun 2016 sebanyak 229 perkara. Adapun jumlah pelanggaran tahun 2014 sebanyak 4.448 perkara, tahun 2015 sebanyak 6.483 perkara, dan tahun 2016 sebanyak 7.663 perkara.

**Tabel 1 : Data Pelanggaran Lalu Lintas dari Segi Profesi, Tahun 2014
Hingga Tahun 2016**

No.	Profesi Pelanggar	2014	2015	2016
1.	Pegawai Negeri	17 Orang	247 Orang	87 Orang
2.	Karyawan Swasta	2942 Orang	3231 Orang	4522 Orang
3.	Mahasiswa	1012 Orang	1407 Orang	1171 Orang
4.	Pelajar	861 Orang	1232 Orang	1110 Orang
5.	Pengemudi	162 Orang	577 Orang	244 Orang
6.	Lain-lain	346 Orang	1654 Orang	529 Orang
Jumlah		5340 Orang	8348 Orang	7663 Orang

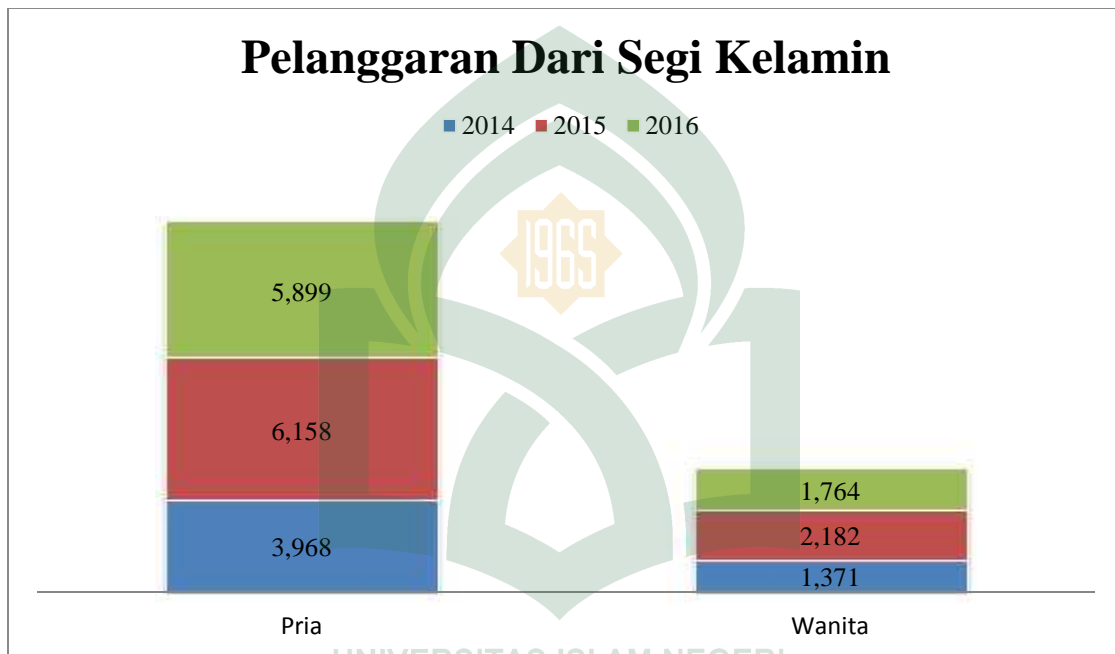
Sumber : Polres Gowa, Diambil pada tanggal 24 Maret 2017

Menanggapi data tersebut di atas penulis beranggapan bahwa tingginya pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya itu membuktikan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada masih jauh dari apa yang diharapkan, di lihat dari segi profesi pelanggar sebagaimana data di atas, karyawan swasta yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 ada sebanyak 2.942 orang sampai dengan tahun 2016 ada sebanyak 4.522 orang, ini membuktikan bahwa *culture* masyarakat

khususnya di Kabupaten Gowa masih sulit untuk mematuhi aturan yang ada dan masih cenderung untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Grafik 2:

Pelanggaran Dari Segi Kelamin



Hasil observasi menunjukkan bahwa Pria tergolong cenderung melakukan pelanggaran dibandingkan wanita, sebagaimana data di atas pada tahun 2015 tindak pelanggaran di Kabupaten Gowa yang dilakukan Pria lebih meningkat ada sebanyak 6.158 dibandingkan tahun 2014 dan 2016. Adapun pada Wanita jumlah tindak pelanggaran yang paling banyak adalah di tahun 2015, ada sebanyak 2.182 Orang.

Tabel 2 : Data Penindakan Tahun 2014 Hingga Tahun 2016

No.	Tindakan	2014	2015	2016
1.	Tilang	4392 Kasus	7072 Kasus	7663 Kasus
2.	Teguran	948 Kasus	1276 Kasus	618 Kasus
Jumlah		5340 Kasus	8348 Kasus	8281 Kasus

Sumber : Polres Gowa, Diambil pada tanggal 24 Maret 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tindakan kasus tilang terbilang lebih banyak dibandingkan tindakan teguran yang dilakukan aparat kepolisian. Ini membuktikan masyarakat masih begitu lemah dalam mengenal hukum, ataukah masyarakat itu sendiri tidak begitu mempedulikan dan menganggap biaya denda yang diberikan terbilang sedikit jika terjadi tilang.

Penulis berharap agar penegakan hukum di masyarakat harus lebih baik lagi dari sekarang karena dengan melihat grafik yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penulis juga berpendapat bahwa bukan aturannya yang terdapat kesalahan melainkan penerapan aturan tersebut belum maksimal karena ulah sebagian oknum penegak hukum itu sendiri yang belum maksimal memberikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

C. Pandangan Masyarakat Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas dalam Hal Menjaga Jiwa dan Hilangnya Harta ditinjau dari Maq sid al-Syar ah

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas. Maraknya jenis pelanggaran juga mencerminkan ketidakpatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Banyaknya pelanggaran yang

berpotensi terhadap kecelakaan, membuat aparat polisi semakin gencar melakukan tindakan persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Pengemudi atau pengendara dalam arti luas adalah masyarakat, jika ditanya soal melanggar lalu lintas setiap masyarakat sebenarnya tidak ingin melakukan pelanggaran apabila melanggar juga mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta apabila terjadi kecelakaan. Tetapi terkadang juga masyarakat tidak mementingkan hal tersebut, dikarenakan adanya beberapa faktor yang memaksa seseorang melakukan pelanggaran.

Masyarakat cenderung meremehkan aturan karena jadwal penilangan yang telah dihafal, serta tempat penilangan yang kurang menyeluruh. Banyak praktek masyarakat yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi objek contoh masyarakat lain.

Soekanto dan Abdullah berpendapat bahwa dapat dikatakan masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, oleh karena norma-norma lainnya tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas.⁹

Sebagai *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini ialah apabila terjadi dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹⁰ Dan menurut Soerjono Soekanto berdasarkan analisis sosiologi hukum, salah satu hal penting yang harus diketahui demi terwujudnya efektivitas

⁹Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 13.

¹⁰Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer, "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat"* (Bandung: Citra Aditya, 2007), h. 23.

hukum dalam masyarakat ialah kepatuhan dan kesadaran hukum dari warga masyarakat.¹¹

Ketaatan/kepatuhan hukum sendiri dibagi dalam 3 bentuk, di antaranya:¹²

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.¹³

¹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 119.

¹²Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat". h. 23.

¹³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 193.

Melihat fenomena pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa terkait dengan penggunaan helm SNI bagi setiap pengendara sepeda motor misalnya, apabila kita sandingkan dengan teori di atas, maka masyarakat kita masih dilatar belakangi oleh ketaatan yang bersifat *compliance*. Dalam artian bahwa mereka mentaati bukan berdasarkan kesadaran hati nurani akan patuhnya terhadap hukum yang mengatur, melainkan hanya patuh hanya karena sanksi-sanksi yang menjadi ancaman aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis kepada masyarakat, disekitar jalan poros malino Batangkaluku. *Mengapa bapak tidak mengenakan helm?* Dani mengatakan, *“tidak ada polisi di sini makanya saya tidak pake helm, lagi pula saya cuma dekat”*.¹⁴ Salah satu alasan masyarakat adalah apabila mereka ingin pergi dan mengira yang dikunjunginya itu dekat sebagian masyarakat tidak ingin menggunakan helm dikarenakan alasan tersebut.

Narti salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, wawancara dilakukan diarea kampus. dengan berbincang-bincang sedikit mengenai pelanggaran lalu lintas, maka Penulis berinisiatif mempertanyakan *apakah anda pernah melakukan pelanggaran lalu lintas?*. *“Dulu saya pernah ditilang karena tidak memiliki SIM, dan ketika itu salah satu Polisi lalu lintas yang akan menilang saya menawarkan untuk sidang di tempat atau sidang di pengadilan. Lalu saya memilih untuk sidang di tempat karena menurut saya apabila sidang di pengadilan prosesnya lebih lama dan dendanya pun bisa lebih mahal”*, kata Narti.¹⁵

¹⁴Dani, Masyarakat Kabupaten Gowa, Wawancara, 10 Juni 2017.

¹⁵Narti, Wawancara, 10 Juni 2017.

Terkadang masyarakat sadar akan apa yang dilakukannya itu salah dan melanggar aturan, tapi kesadaran itu tidak sesuai dengan tindakan yang diberikan. Ketidaktahuan juga salah satu alasan masyarakat melakukan pelanggaran, sebagaimana dengan hasil wawancara Penulis dengan pengguna jalan bernama Nisa dan Inha. *“Pada saat itu saya tidak melihat adanya rambu-rambu/marka jalan, makanya saya melawan arus”*, kata Nisa. Inha mengatakan *“saya lupa membawa STNK, kemarin motor beserta STNK dipinjam oleh saudara dan saya lupa meminta kembali STNK saya. Saat ada pemeriksaan saya ditilang karna masalah tersebut”*.¹⁶

Itulah wawancara saya terhadap seorang yang melanggar lalu lintas, wawancara tersebut berlangsung di jalan poros malino Batangkaluku, saat itu tidak hanya 1 atau 2 orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas tapi puluhan orang yang melanggar lalu lintas di daerah Batangkaluku.

Hal tersebut di atas telah mengisyaratkan kepada kita, bahwa masyarakat kita masih banyak yang tidak mematuhi aturan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai hukum ia memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi.

Dengan mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan, sesungguhnya problematika dalam masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum ini karena belum terciptanya kesadaran atas hukum dalam diri setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, taraf kesadarannya didasarkan beberapa faktor-faktor sebagai

¹⁶Nisa dan Inha, Wawancara, 13 Juni 2017.

berikut: 1) Pengetahuan tentang peraturan; 2) Pemahaman hukum; 3) Sikap hukum dan; 4) Pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dan tujuan peraturan dari suatu hukum tertentu. Sikap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu hukum yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sementara itu, pola perilaku hukum (*legal behavior*) merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena pola perilaku hukum ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum suatu masyarakat.

Hukum Islam ada namanya *Maq sid al-Syar ah* atau tujuan hukum Islam. Dalam rangka pembagian *Maq sid al-Syar ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamṣah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).¹⁷

Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa

¹⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maq sid al-Syar ah Menurut al-Syatibi* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 10.

syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan, dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana).

Ibadah bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. *Jinayat* sebagai benteng tepeliharanya kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, hudud untuk melindungi keturunan dan akal.

Menurut imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁸ al-Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan thasiniyat (tersier).

a. Kebutuhan *Dharuriyyat* (primer)

Kebutuhan *dharuriyyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.

¹⁸Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t;), h. 6.

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Apabila ada pengendara sepeda motor yang nekad melintasi saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau meninggal dunia. Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan lampu merah. Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan syariah, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akhirat.

b. Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Kebutuhan *Hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan hajiyat. Dalam lapangan ibadah, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah takhlif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang berpergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar shalat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan

perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan ‘uqubat (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Maidah/5:6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ دَحْرَجٍ ...

Terjemahnya :

“...Allah tidak ingin menyulitkan kamu...”¹⁹

Rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *Maq sid*. Jelasnya, jika *hajiyyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *dharuriyyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajiyyat*, tidaklah merusak seluruh *maslahat* sebagaimana halnya *dharuriyyat*.²⁰

c. Kebutuhan *Tahsiniyyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan *tahsiniyyat*, merupakan tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2009), h.144.

²⁰al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 10-11.

Tujuan syariat ini diisyaratkan dalam al-Quran diantaranya QS.al-Maidah/5:6

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“... tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”²¹

Ketiga tingkatan kebutuhan tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. *Tahsiniyat* adalah bersifat pelengkap bagi *hajiyyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *dharuriyat*. Kebutuhan *dharuriyat* adalah dasar dari semua kebutuhan.



²¹Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, h. 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa salah satunya adalah faktor manusia. Jenis pelanggaran yang terkait yaitu surat-surat kendaraan, helm standar, kecepatan, dan masih banyak lagi. Adapun jumlah pelanggaran tahun 2014 sebanyak 4.448 perkara, tahun 2015 sebanyak 6.483 perkara, dan tahun 2016 sebanyak 7.663 perkara. Penegakan hukum yang diberikan aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan efek pencegahan terlebih dahulu agar pelanggaran itu tidak terulang, harapannya dengan denda yang diberikan kepada pelanggar membuat mereka sadar agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
3. *Maq sid al-Syar ah* atau tujuan hukum Islam. Dalam rangka pembagian *Maq sid al-Syar ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk para masyarakat agar mengerti aturan perundang-undang tentang berlalu lintas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk para penegak hukum dalam artian kepolisian agar lebih tegas lagi dalam menjalankan penegakan hukum.
3. Pengemudi ataupun masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam berkendara, agar menjaga jiwa dan hartanya sesuai dengan *Maq sid al-Syar ah* (tujuan hukum Islam).



.0DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Abubakar, Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.
- Alam, Nursyamsu. Satlantas Polres Gowa, Wawancara, 24 Maret 2017
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teoro Peradilan (judicialprudence)*. Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Al-Qaradhwai, Yusuf. *Fiqih Maq sid al-Syar ah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Bahtiar, Efendi. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maq sid al-Syar ah Menurut al-Syatibi*. Ed. I, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fitriani, Nur. *Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas* Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2011.
- Fuadi, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, "Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat"*. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Hadiman. H. *Menuju Terib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gadhesapura Mas, 1986.
- Hobbs, F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Ikhsan. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2009.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maq sid al-Syar ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- J.Maleong, Lexii. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Pertama* . Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2009.

- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Kompetensi Utama, Semarang., 2009.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara: Jakarta., 1992.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 butir 2.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Pusat Studi Indonesia-UT, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- , *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- , *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Maju Mundur, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Insitut Teknologi Bandung, 2002.
- Yakup, Mohammad. *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*. Malang Fakultas Hukum: Skripsi tidak diterbitkan, 2002.

BIODATA PENULIS



Fitriani B, lahir di Kabupaten Gowa 09 Agustus 1995. Putri sulung dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak **Baharuddin** dan Ibu **Jumaliah**. Penulis mengawali pendidikan di **Sekolah Dasar Inpres (SDI) Buttadidi** Kabupaten Gowa pada tahun 2002. Pada tahun berikutnya Ia melanjutkan pendidikannya ke **Madrasah Tsanawiyah Aisyiyah Sungguminasa** Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikannya ditahun yang sama ke **Sekolah Menengah Atas (SMA) Yapip Makassar** dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun itu pula Penulis melanjutkan pendidikannya dijenjang Universitas dan mengikuti seleksi pada Ujian Masuk Khusus, berhasil diterima sebagai mahasiswa **Universitas Islam Negeri Makassar** tepatnya di Program Studi Perbandingan Mazhab & Hukum Fakultas Syariah & Hukum.